

HAK KEPERDATAAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERGABUNG DENGAN ORGANISASI TERORIS INTERNASIONAL

Muhammad Syam Riva'i

ABSTRAK

Ancaman terorisme sering kali membahayakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dimana terdapat organisasi teroris yang melancarkan aksi ekstremis secara global, yakni *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS). ISIS sendiri telah dinyatakan kalah oleh *Syrian Democratic Forces*, namun kekalahan ISIS tersebut menimbulkan permasalahan baru. Nasib orang-orang bekas ISIS yang berasal dari berbagai negara lain menjadi terlantarkan, termasuk warga negara Indonesia (WNI). Sikap keputusan Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memulangkan anak WNI eks ISIS. Keputusan tersebut bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional karena sejatinya anak WNI eks ISIS mempunyai hak keperdataan yang wajib dilindungi oleh negara. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan kemudian analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak keperdataan anak WNI eks ISIS tetap berlaku dengan menempatkan kedudukan mereka sebagai anak korban jaringan terorisme sebagaimana Pasal 59 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga dapat diberikan perlindungan khusus untuk memulihkan hak keperdataan anak-anak tersebut. Prosedur dan teknis pemberian perlindungan hukum kepada anak WNI eks ISIS merujuk pada Pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Permen PPPA RI Nomor 7 Tahun 2019, dan Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021, secara garis besarnya dengan memberikan edukasi, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Kata Kunci: Hak Keperdataan, Anak WNI eks ISIS, Perlindungan Hukum

THE CIVIL RIGHTS OF INDONESIAN EX-CHILDS WHO ARE JOINED AN INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATION

Muhammad Syam Rival'i

ABSTRACT

The threat of terrorism often endangers the state in the field of defence and security where there is a terrorist organization that launches extremist actions globally, namely the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS itself has been declared defeated by the Syrian Democratic Forces, but the defeat of ISIS raises new problems. The fate of ex-ISIS people from various other countries has become neglected, including Indonesian citizens (WNI). The Indonesian government's decision not to repatriate Indonesian Childs ex-ISIS until now. This decision is contrary to national and international law because the Indonesian Childs ex-ISIS have civil rights that must be protected by the state. The research method used is the normative juridical research method by taking a statue approach, conceptual approach, and case approach. Data collection techniques are carried out by literature study then data analysis is carried out using qualitative analysis techniques. The results show that the civil rights of Indonesian Childs ex-ISIS remain valid by placing their position as children of victims of terrorism networks as Article 59 paragraph (2) letter k of Law Number 35/2014 so that special protection can be given to restore the children's civil rights. The procedures and techniques for providing legal protection to Indonesian Childs ex-ISIS refer to Article 69B of Law Number 35/2014, Ministerial of PPPA RI Regulation Number 7/2019, and BNPT Regulation Number 6/2021, by providing education, counselling, social rehabilitation, and social assistance.

Keywords: Civil Rights, Indonesian Childs ex-ISIS, Legal Protection